

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Puskesmas Tigalingga terletak di Desa Lau Bagot Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Puskesmas Tigalingga ini memiliki kondisi bangunan yang telah direhabilitasi dan diresmikan pada tanggal 7 februari 2023 oleh Bupati Dairi Eddy Berutu. Puskesmas Tigalingga berada di Kecamatan Tigalingga dengan jarak ke Ibukota Kabupaten Dairi yaitu Sidikalang sekitar 28 KM dan terletak dibagian Utara Kabupaten Dairi. Wilayah Kecamatan Tigalingga terdiri dari perbukitan, Ketinggian daerah ini membuatnya memiliki pemandangan alam yang indah serta suhu udara yang sejuk. Suku penduduk kecamatan Tigalingga adalah sub-etnis Batak, yaitu Batak Karo dan Batak Pakpak. Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, perdagangan. Komoditas utama yang dihasilkan adalah durian, Kakao.

Secara geografis luas wilayah kerja Puskesmas Tigalingga adalah 197 KM². Secara astronomi terbentang antara (2°15 - 3°00) Bujur Tmur (BT) dan (98°00 - 98°30) Lintang Utara (LU) dan terletak diatas permukaan laut (500 -700 M) yang memiliki batas wilayah kerja sebagai berikut:

- a) Sebelah Timur : Kecamatan Siempat Nempu dan Siempat Nempu Hulu
- b) Sebelah Barat : Kecamatan Gunung Sitember
- c) Sebelah Selatan : Kecamatan Pegagan Hilir
- d) Sebelah Utara : Kecamatan Tanah Pinem

Jarak tempuh dari Puskesmas Tigalingga bisa memakai kendaraan roda 2, 3, dan 4. Menurut data Puskesmas Tigalingga pada tahun 2023, jumlah Masyarakat yang dioperasikan Puskesmas Tigalingga sebanyak 24.315 jiwa, dengan total KK

7174, dan melayani 14 desa yaitu Sumbul Tengah, Ujung Teran, Juma Gerat, Sarintonu, Tigalingga, Palding, Lau Bagot, Bertungen Julu, Lau Molgap, Lau Pakpak, Sukandebi, Laumil, Lau Sireme dan Palding Jaya Sumbul. Berikut daftar PUS di wilayah kerja Puskesmas Tigalingga Kabupaten Dairi.

Table 4.1 Jumlah Penduduk Pasangan Usia Subur (PUS) di Wilayah Kerja Puskesmas Tigalingga Kabupaten Dairi

No	DESA	JUMLAH PUS
1	Sumbul Tengah	136 Jiwa
2	Ujung Teran	145 Jiwa
3	Jumat Great	210 Jiwa
4	Sarintonu	203 Jiwa
5	Tigalingga	121 Jiwa
6	Palding	151 Jiwa
7	Lau Bagot	280 Jiwa
8	Bertungen Julu	146 Jiwa
9	Lau Molgap	94 Jiwa
10	Lau Pakpak	135 Jiwa
11	Sukandebi	218 Jiwa
12	Laumil	198 Jiwa
13	Lau Sireme	307 Jiwa
14	Palding Jaya Sumbul	224 Jiwa

Sumber: New Siga Puskesmas Tigalingga Kabupaten Dairi 2023

4.2 Visi dan Misi Puskesmas Tigalingga Kabupaten Dairi

1. Mewujudkan masyarakat Tigalingga yang sehat dan mandiri demi tercapainya Dairi Unggul
2. Meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan yang sesuai standar
3. Membangun kualitas sumber daya Masyarakat yang unggul dalam pelayanan
4. Memberdayakan dan mendorong kemandirian masyarakat dan keluarga untuk berperilaku hidup sehat

4.3 Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Tigalingga Kabupaten Dairi yaitu sebanyak 75 orang. Hal tersebut dapat dilihat dari table 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Data Tenaga Kesehatan Puskesmas Tigalingga Kabupaten Dairi

No	Jenis SDM Kesehatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dokter Umum	1	-	1
2	Dokter Gigi	-	1	1
3	Perawat	2	11	13
4	Bidan	-	45	45
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat	-	2	2
6	Pengadministrasian Program Penyakit Menular	1	-	1
7	Epidemiologi Kesehatan	-	1	1
8	Tenaga Kesehatan Lingkungan	1	1	2
9	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	-	1	1
10	Tenaga Gizi	-	1	1
11	Tenaga Lainnya	-	1	1
12	Tenaga Kefarmasian	-	1	1
13	Asisten Apoteker	1	-	1
14	Rekam Medik	-	1	1
15	Administrasi Keuangan	-	1	1
16	Administrasi Umum	-	-	-
17	Sopir Ambulance	1	-	1
18	Cleaning service	-	1	1
	Jumlah	7	68	75

Sumber: Profil Puskesmas Tigalingga 2023

4.4 Sarana Pelayanan Kesehatan

Satu Puskesmas Induk, 11 Puskesmas Pembantu, dan 10 Poskesdes di wilayah operasional Puskesmas Tigalingga Kabupaten Dairi. Tabel di bawah ini menggambarkan berikut:

Tabel 4.3 Data Sarana Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Tigalingga Kabupaten Dairi

Sarana Kesehatan	Jumlah
Puskesmas	1
Puskesmas Pembantu	11
Poskesdes	10

Sumber: Profil Puskesmas Tigalingga 2023

4.5 Karakteristik Informan

Data yang menjadi dasar penelitian dikumpulkan melalui metode wawancara. Sebuah laporan tunggal disusun dari tujuh sumber, termasuk: 1 Kepala Puskesmas, 1 Petugas Pelayanan KB, 1 Petugas Pencatat Pelapor KB, 2 Peserta KB dan 2 PUS.

Tabel 4.4 Karakteristik Informan

Inisial	Jenis Kelamin	Umur	Jabatan/Peran	Kode
J.K.	Perempuan	46 Tahun	Kepala Puskesmas	IK-1
D.T.	Perempuan	52 Tahun	Penanggung Jawab Pelayanan KB	IA-1
D.S.	Perempuan	37 Tahun	Penanggung jawab Pencatat Pelapor KB	IA-2
N.B.	Perempuan	38 Tahun	Peserta KB	IP-1
D.O.S	Perempuan	23 Tahun	Peserta Kb	IP-2
S.A.	Perempuan	40 Tahun	PUS	IP-3
E.B.	Perempuan	39 Tahun	PUS	IP-4

4.6 Hasil Penelitian

4.6.1 Analisis Komponen Komunikasi

Dalam Widodo (2010:97), Edward III mendefinisikan komunikasi sebagai transfer informasi dari satu komunikator ke komunikator lainnya. Edward III mengatakan dalam Widodo (2010:97) bahwa penghibur harus mempelajari data strategi terbuka sehingga mereka dapat merencanakan dan melaksanakan pelaksanaan pengaturan untuk memastikan tujuan dan sasaran strategi terpenuhi.

Transmisi Dalam konteks wawancara skripsi, transmisi merujuk pada proses penyampaian atau penyebaran informasi dari satu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini, transmisi informasi bisa melibatkan bagaimana data, pesan, atau kebijakan yang diperoleh dari wawancara dikomunikasikan dari narasumber kepada peneliti atau pihak lain yang berkepentingan.

Table 4.5 matriks hasil wawancara dengan informan tentang penyebaran

informasi mengenai program KB kepada sasaran Masyarakat

Informan	Pernyataan
IK-1	<i>“transmisi kebijakan program KB disampaikan melalui sosialisasi dan pelatihan kepada pelaksana di puskesmas trus hanya melalui penyuluhan langsung ke Masyarakat, yang ditargetkan PUS, Wanita usia 15-49 tahun tujuannya mengendalikan pertumbuhan penduduk dan KIA”</i>
IA-1	<i>“Ketika ada Masyarakat yang datang kemari untuk pemasangan KB, saya secara langsung memberikan penjelasan kepada peserta yang ingin memakai KB”</i>
IA-2	<i>“saya menyampaikan informasi tentang KB dengan mengadakan sosialisasi antar desa dan serta melibatkan media sosial”</i>

Program Keluarga Berencana (KB) dilaksanakan melalui beberapa langkah strategis untuk mencapai tujuannya, yaitu mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak (KIA) dengan cara sosialisasi dan pelatihan, pelaksana di puskesmas diberikan sosialisasi dan pelatihan terkait kebijakan program KB untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan layanan KB kepada masyarakat, setelah pelaksana di puskesmas terlatih, mereka melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Penyuluhan ini menargetkan Pasangan Usia Subur (PUS) dan wanita berusia 15-49 tahun. Ketika masyarakat datang ke puskesmas untuk pemasangan alat kontrasepsi, mereka diberikan penjelasan langsung mengenai KB oleh petugas. Ini membantu calon pengguna KB memahami manfaat dan cara penggunaan alat kontrasepsi yang sesuai. Untuk menjangkau lebih banyak orang, informasi tentang KB juga disampaikan melalui sosialisasi antar desa dan dengan

melibatkan media sosial. Pendekatan ini memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB.

Tabel 4.6 matriks hasil wawancara dengan informan tentang mendapatkan informasi mengenai program KB di puskesmas

Informan	Pernyataan
IP-1	<i>“pada waktu itu ada penyuluhan mengenai program KB</i>
IP-2	<i>“pertama kali mendapat informasi dari sosial media”</i>
IP-3	<i>“waktu saya melahirkan anak pertama dianjurkan untuk ber KB dijelaskan tentang KB tersebut”</i>
IP-4	<i>“pada waktu cek kandungan di puskesmas disitulah di beritahu tentang penjelasan KB”</i>

Program Keluarga Berencana (KB) disampaikan melalui berbagai saluran yang efektif untuk memastikan masyarakat mendapatkan pemahaman yang baik. Informasi ini diberikan melalui penyuluhan langsung yang diadakan di berbagai kesempatan, memungkinkan masyarakat memperoleh penjelasan secara tatap muka. Selain itu, media sosial juga menjadi sumber penting di mana banyak individu pertama kali mengetahui tentang program KB. Setelah melahirkan anak pertama, ibu-ibu dianjurkan untuk mengikuti program KB, dan pada saat itu mereka menerima penjelasan yang rinci mengenai KB. Pemeriksaan kehamilan di puskesmas juga menjadi momen penting di mana wanita mendapat informasi dan penjelasan mengenai KB, memastikan mereka memahami manfaat dan cara penggunaan alat kontrasepsi yang sesuai. Dengan pendekatan yang beragam ini, penyebaran informasi KB dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat pada berbagai tahap kehidupan mereka, membantu mencapai tujuan utama program mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

Kejelasan adalah untuk memastikan bahwa strategi yang dikirim ke

pelaksana, kelompok sasaran, dan kelompok lain yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap strategi tersebut dapat diakui sehingga mereka mengetahui apa arti kesepakatan publik, apa tujuannya, dan apa saja isinya.

Tabel 4.7 Matriks hasil wawancara dengan informan tentang kejelasan penyampaian informasi mengenai Program KB kepada masyarakat

Informan	Pernyataan
IA-1	<i>“saya menggunakan Bahasa sehari hari untuk memberikan informasi kepada peserta KB”</i>
IA-2	<i>“ya dengan menggunakan Bahasa yang sederhana yang mudah dipahami”</i>

Dalam upaya memberikan informasi kepada peserta Keluarga Berencana (KB), selalu berusaha menggunakan bahasa sehari-hari yang familiar dan mudah dipahami oleh mereka. Penggunaan bahasa yang sederhana dan tidak berbelit-belit menjadi prioritas utama, karena untuk memastikan bahwa semua peserta, tanpa terkecuali, dapat dengan mudah menangkap dan memahami pesan yang di sampaikan. Dengan cara ini, informasi tentang KB dapat tersampaikan dengan efektif, dan peserta merasa lebih nyaman serta percaya diri dalam menyerap pengetahuan yang diberikan. Pendekatan ini juga membantu peserta untuk lebih mudah mengambil keputusan yang tepat dan sesuai kebutuhan mereka terkait program KB.

Tabel 4.8 Matriks hasil wawancara dengan informan mengenai kejelasan untuk menindaklanjuti umpan balik dari Masyarakat

Informan	Pernyataan
IA-1	<i>“ya sering, menanggapi dengan penuh perhatian terhadap pertanyaannya yang diberikan”</i>
IA-2	<i>“ya selalu Ketika penyuluhan menanggapi dengan santai”</i>

Dalam setiap sesi penyuluhan Keluarga Berencana (KB), selalu berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung dan terbuka bagi para peserta. Ketika peserta KB mengajukan pertanyaan, petugas menanggapi dengan penuh perhatian, memastikan bahwa setiap pertanyaan didengar dan dipahami dengan baik dan percaya bahwa setiap pertanyaan yang diajukan oleh peserta adalah cerminan dari kebutuhan dan kekhawatiran mereka, sehingga harus memberikan jawaban dengan serius, sambil menunjukkan empati dan kepedulian terhadap apa yang mereka sampaikan. Selain itu, berusaha menjaga suasana penyuluhan tetap santai dan ramah. Dengan menjaga pendekatan yang tenang dan tidak terburu-buru dan ingin menciptakan ruang di mana peserta merasa nyaman untuk berdialog dan mengemukakan pandangan mereka tanpa rasa takut atau ragu. Sikap santai ini juga membantu peserta untuk lebih terbuka dan aktif dalam berpartisipasi, sehingga penyuluhan menjadi lebih interaktif dan efektif. Dengan cara ini berharap peserta KB merasa didukung dalam perjalanan mereka memahami dan menjalani program KB, serta lebih percaya diri dalam mengambil keputusan yang tepat bagi diri mereka dan keluarga.

Konsisten ialah ketetapan dan keteguhan dalam bertindak, mengandung arti bahwa perintah-perintah yang diberikan untuk pelaksanaan kebijaksanaan dalam Komunitas haruslah konsisten. sebab pekerjaan mengubah atau membingungkan mereka yang ada di lapangan.

Table 4.9 Matriks hasil wawancara dengan informan tentang konsisten yang ditunjukkan dalam pelaksana program KB kepada Masyarakat

Informan	Pernyataan
IA-1	<i>“biasanya kami yang berada di bidang KB hampir sering mengikuti pelatihan rutin supaya penyampaian kami konsisten”</i>
IA-2	<i>“saya memastikannya dengan</i>

	<i>mengikuti materi dan panduan resmi yang disediakan puskesmas dari pemerintah, supaya bisa maksimal menyampaikan informasi kepada Masyarakat”</i>
IP-1	<i>“ya sama, memastikannya bertanya langsung kepada bidan atau petugas KB lagi”</i>
IP-2	<i>“sama, engga ada perbedaan, biasanya saya berdiskusi sesama peserta KB</i>
IP-3	<i>“sama juga, langsung bertanya kepada petugas untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam”</i>
IP-4	<i>“iya pasti sama karna orang yg saya jumpai itu itu aja”</i>

Sebagai petugas yang bekerja di bidang Keluarga Berencana (KB), sering mengikuti pelatihan rutin untuk memastikan bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat tetap konsisten dan akurat. Pelatihan ini penting bagi petugas agar selalu update dengan perkembangan terbaru serta standar yang harus diterapkan dalam program KB. Untuk memastikan bahwa informasi yang mereka sampaikan sesuai dengan panduan resmi, mereka selalu mengikuti materi dan panduan yang disediakan oleh puskesmas serta pemerintah. Hal ini membantu dalam memberikan informasi yang maksimal dan tepat kepada masyarakat. Selain mengikuti pelatihan dan panduan resmi, sering juga berdiskusi langsung dengan bidan atau petugas KB lainnya untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam. Diskusi ini membantu dalam memperjelas poin-poin yang mungkin kurang dipahami, sehingga ketika harus menyampaikan informasi kepada peserta KB, bisa melakukannya dengan percaya diri dan pengetahuan yang solid. Tak hanya berdiskusi dengan petugas, sering juga bertukar pikiran dengan sesama peserta KB. Diskusi antar peserta menjadi cara yang efektif untuk saling menguatkan pemahaman dan memastikan

bahwa semua orang berada pada jalur yang sama dalam memahami program KB. Dalam situasi tertentu, ketika ada hal yang kurang jelas, petugas tidak ragu untuk bertanya langsung kepada petugas KB. Hal ini penting, terutama karena orang-orang yang di temui dalam pekerjaan ini biasanya adalah mereka yang sama, sehingga menjaga kesinambungan dan konsistensi dalam informasi yang disampaikan menjadi sangat krusial. Dengan pendekatan ini, dapat memberikan informasi yang tepat dan mendukung kesuksesan program KB di masyarakat.

“transmisi kebijakan program KB disampaikan melalui sosialisasi dan pelatihan kepada pelaksana di puskesmas trus hanya melalui penyuluhan langsung ke Masyarakat, yang ditargetkan PUS, Wanita usia 15-49 tahun tujuannya mengendalikan pertumbuhan penduduk dan KIA”(IK-1)

“waktu saya melahirkan anak pertama dianjurkan untuk ber KB dijelaskan tentang KB tersebut” (IP-3). “pada waktu cek kandungan di puskesmas disitulah di beritahu tentang penjelasan KB”(IP-4)

Pernyataan pertama (IK-1) menjelaskan bahwa kebijakan program Keluarga Berencana (KB) disosialisasikan melalui pelatihan di puskesmas dan penyuluhan langsung kepada masyarakat, dengan target utama Pasangan Usia Subur (PUS) dan wanita usia 15-49 tahun. Pernyataan ini konsisten dengan pengalaman yang diungkapkan dalam pernyataan kedua (IP-3) dan ketiga (IP-4), di mana individu mengaku mendapat informasi tentang KB saat melahirkan dan saat cek kandungan di puskesmas. Penyuluhan yang disebutkan dalam IK-1 tampaknya berfungsi dengan baik, sebagaimana dibuktikan oleh pengalaman responden dalam IP-3 dan IP-4, yang mendapatkan informasi mengenai KB secara langsung di fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Ini menunjukkan bahwa kebijakan dan praktik di lapangan berjalan seiring, di mana pelaksana di puskesmas tidak hanya mendapatkan pelatihan tetapi juga meneruskan informasi tersebut kepada target kelompok, yaitu wanita usia 15-49 tahun, sesuai dengan tujuan program KB yang

lebih luas.



Gambar 4.1 Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB)

4.6.2 Analisis Komponen Sumber Daya

Edward III, sebagaimana yang dikemukakan Widodo (2010:98), sangat bergantung pada faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98), sumber daya tersebut meliputi sumber daya kewenangan, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya manusia.

Table 4.10 Data Capaian Jumlah Pemakai Alat Kontrasepsi

NO	jenis alat kontrasepsi	JUMLAH PEMAKAI			TOTAL
		2022	2023	2024 jan-Mei	
1	IUD	40	43	3	86
2	MOW	91	194	-	185
3	MOP	-	-	-	-
4	IMPLANT	238	427	61	726
5	SUNTIKAN	190	396	-	586
6	PIL	65	154	-	219
7	KONDOM	18	56	-	74
8	MAL	-	-	-	-
9	TRADISIONAL	1	13	-	14
	JUMLAH PUS	1789	2568	2609	6966
	JUMLAH PESERTA KB	831	1230	1373	3434

Sumber: New Siga Puskesmas Tigalingga Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan peserta Keluarga Berencana (KB) dari tahun 2022 jumlah peserta KB sebanyak 1789 dan meningkat di tahun 2023 sebanyak 1230, dan jenis alat kontrasepsi paling banyak dipakai yaitu alat jenis kontrasepsi Implant sebanyak 726 dan yang paling sedikit atau tidak digunakan alat kontrasepsi jenis Metode Amenore Laktasi (MAL) dan Metode Operasi Pria (MOP) dikarenakan pada Metode Operasi Pria (MOP) lelaki merasa bahwa prosedur ini permanen dan bisa mengurangi kejantanan atau kemampuan seksual, sementara Metode Amenore Laktasi (MAL) ini dianggap kurang praktis dan tidak dapat diandalkan oleh Sebagian orang terutama jika terjadi perubahan dalam pola menyusui.

Tabel 4.11 Matriks hasil wawancara dengan informan mengenai jumlah tenaga kesehatan dalam pelayanan program kb di puskesmas

Informan	Pernyataan
IA-1	Jumlah staff yang cukup dan merata dan tidak kurang
IA-2	Staff nya cukup dan memadai

Di Puskesmas Tigalingga, jumlah staf yang tersedia cukup dan merata, memastikan bahwa setiap tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik. Ketersediaan staf yang memadai ini memungkinkan puskesmas untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dengan jumlah staf yang cukup, setiap unit dan layanan di puskesmas dapat berfungsi secara efektif, tanpa mengalami kekurangan tenaga kerja. Hal ini penting untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan, serta memastikan bahwa semua kebutuhan pasien dapat terpenuhi dengan cepat dan efisien.

Tabel 4.12 Matriks hasil wawancara dengan informan mengenai pelatihan pengembangan tenaga kesehatan dalam pelayanan program kb di puskesmas

Informan	Pernyataan
-----------------	-------------------

IA-1	<i>“ya sudah saya jelaskan tadi ada pelatihan rutin yang sering kami ikuti tentang program KB”</i>
IA-2	<i>“ada, pelatihan ini membantu meningkatkan keterampilan dalam memberikan informasi yang akurat”</i>

Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya, petugas secara rutin mengikuti pelatihan terkait program Keluarga Berencana (KB). Pelatihan ini diadakan dengan frekuensi yang cukup sering dan merupakan bagian penting dari upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Melalui pelatihan ini, tidak hanya memperbarui pengetahuan mengenai perkembangan terbaru dalam program KB, tetapi juga meningkatkan keterampilan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan tepat sasaran. Dengan mengikuti pelatihan secara rutin, dapat memastikan bahwa informasi yang di sampaikan kepada masyarakat selalu sesuai dengan panduan terbaru dan dapat dipercaya, sehingga program KB dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Tabel 4.13 Matriks hasil wawancara dengan informan mengenai pelayanan tenaga kesehatan dalam pelayanan program kb di puskesmas

Informan	Pernyataan
IP-1	<i>“petugasnya ramah dan sigap”</i>
IP-2	<i>“sikapnya friendly”</i>
IP-3	<i>“pelayanannya bagus”</i>
IP-4	<i>“empati dan peduli apa yang kita tanyakan”</i>

Petugas di Puskesmas Tigalingga ini dikenal karena keramahannya dan sikap yang sigap dalam melayani masyarakat. Mereka tidak hanya bersikap friendly, tetapi juga menunjukkan empati dan kepedulian yang tinggi terhadap setiap pertanyaan atau kekhawatiran yang disampaikan oleh pasien. Pelayanan yang diberikan selalu memuaskan, dengan petugas yang senantiasa berusaha memastikan bahwa setiap orang merasa didengarkan dan dihargai. Sikap ramah dan perhatian ini menciptakan

suasana yang nyaman bagi masyarakat, sehingga mereka merasa lebih percaya diri dan terbuka dalam mengungkapkan kebutuhan mereka. Dengan kombinasi pelayanan yang bagus, empati, dan kepedulian, petugas berhasil membangun hubungan yang positif dan konstruktif dengan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan.

Tabel 4.14 Matriks hasil wawancara dengan informan mengenai fasilitas dalam pelayanan program kb di puskesmas

Informan	Pernyataan
IA-1	<i>“fasilitas dan layanan sudah cukup memadai dengan akses mudah ke kontrasepsi dan informasi”</i>
IA-2	<i>“ya, sarana dan prasarana di bidang KB sudah memadai”</i>
IP-1	<i>“sudah lengkap dan tidak kurang”</i>
IP-2	<i>“ada semua, seperti penyedia alat kontrasepsi”</i>

Fasilitas dan layanan di bidang Keluarga Berencana (KB) telah disediakan dengan standar yang memadai, menjamin akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan kontrasepsi dan informasi yang diperlukan. Sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan ini dirancang secara komprehensif, memastikan bahwa semua kebutuhan terkait KB dapat dipenuhi dengan baik. Fasilitas yang tersedia sudah lengkap dan tidak mengalami kekurangan, mencakup berbagai jenis alat kontrasepsi serta materi edukasi yang relevan. Dengan adanya penyedia alat kontrasepsi yang beragam dan informasi yang mudah diakses, masyarakat tidak hanya dapat memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi juga mendapatkan panduan yang jelas mengenai penggunaannya. Sarana ini mencakup segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung program KB secara efektif, mulai dari penyediaan alat kontrasepsi yang beragam hingga penyampaian

informasi yang akurat. Keberadaan fasilitas yang memadai ini mendukung kelancaran program KB, memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan layanan dan dukungan yang mereka butuhkan. Dengan demikian, fasilitas dan layanan di bidang KB dapat berfungsi secara optimal, memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

“Jumlah staff yang cukup dan merata dan tidak kurang ada pelatihan rutin yang sering kami ikuti tentang program KB” (IA-1)

“Staff nya cukup dan memadai ,ada pelatihan ini membantu meningkatkan keterampilan dalam memberikan informasi yang akurat” (IA-2)

Kedua pernyataan tersebut memberikan gambaran yang konsisten mengenai kecukupan staf dan pelatihan yang ada di fasilitas kesehatan terkait dengan program Keluarga Berencana (KB). Dalam pernyataan pertama (IA-1), disebutkan bahwa jumlah staf yang cukup dan merata, serta adanya pelatihan rutin yang diikuti oleh staf. Ini menandakan bahwa pelatihan tersebut adalah bagian integral dari upaya untuk menjaga kualitas pelayanan dalam program KB. Pernyataan kedua (IA-2) memperkuat informasi ini dengan menyebutkan bahwa pelatihan yang diadakan membantu meningkatkan keterampilan staf dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pelatihan rutin yang diadakan tidak hanya ada tetapi juga efektif dalam meningkatkan kapasitas staf untuk menjalankan program KB dengan baik. Secara keseluruhan, triangulasi ini menunjukkan bahwa dengan adanya jumlah staf yang cukup dan pelatihan rutin, kualitas penyampaian informasi tentang KB oleh staf dapat dijaga dan ditingkatkan, sesuai dengan tujuan program.



Gambar 4.2 Pelaksanaan Program Keluarga Berencana

4.6.3 Analisis Komponen Disposisi

Dalam Widodo (2010:104), Edward III menyatakan bahwa disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh agar tujuan kebijakan tercapai. Dalam Widodo (2010:104-105), Edward III menyatakan bahwa agar implementasi kebijakan berhasil dan efektif, para pelaksana tidak hanya perlu mampu melaksanakannya dan mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemauan untuk melakukannya.

Tabel 4.15 Matriks hasil wawancara dengan informan mengenai disposisi

Informan	Pernyataan
IK-1	<i>“pihak puskesmas memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang optimal termasuk menyediakan informasi yang jelas dan konseling yang mendalam”</i>
IA-1	<i>“ya komitmen terhadap kerjaan saya dan memberikan pelayanan yang berkualitas”</i>
IA-2	<i>“ya bertanggungjawab sama kerjaan”</i>
IP-1	<i>“sikap petugas memuaskan dan pelayanan yang baik”</i>

IP-2	<i>“puas terhadap perlakuannya”</i>
IP-3	<i>“biasa aja “</i>
IP-4	<i>“memuaskan”</i>

Pihak yang terlibat dalam pelayanan Keluarga Berencana (KB) menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Mereka berfokus pada penyediaan informasi yang jelas dan konseling yang mendalam, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai program KB. Komitmen ini tercermin dalam dedikasi mereka untuk pekerjaan dan upaya yang dilakukan dalam memberikan pelayanan berkualitas. Petugas di lapangan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan mereka, dan sikap mereka terhadap tugas yang diemban umumnya memuaskan. Banyak orang merasa puas dengan perlakuan yang diberikan, karena petugas bertindak dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Meskipun ada beberapa pendapat bahwa sikap petugas terkesan biasa saja, secara keseluruhan, pengalaman pelayanan yang diterima dianggap memuaskan. Kepuasan terhadap sikap dan pelayanan petugas menunjukkan bahwa komitmen mereka terhadap pekerjaan dan kualitas pelayanan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dengan sikap yang profesional dan tanggung jawab yang tinggi, petugas berhasil menciptakan pengalaman yang positif bagi masyarakat, mendukung keberhasilan program KB, dan memastikan bahwa semua kebutuhan dan harapan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

“sikap petugas memuaskan dan pelayanan yang baik” (IP-1)

“biasa aja” (IP-3)

Dua pernyataan ini menggambarkan pandangan yang berbeda mengenai sikap dan pelayanan petugas dalam program Keluarga Berencana (KB). Pernyataan

pertama (IP-1) menekankan bahwa sikap petugas dianggap memuaskan dan pelayanannya baik, menunjukkan adanya pengalaman positif dengan petugas kesehatan. Ini mungkin mencerminkan situasi di mana petugas telah menerima pelatihan yang memadai dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas serta berinteraksi dengan baik dengan masyarakat. Namun, pernyataan kedua (IP-3) menyampaikan pengalaman yang kurang berkesan, dengan deskripsi "biasa aja," yang mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan mungkin tidak sepenuhnya memenuhi harapan atau standar yang diharapkan oleh penerima layanan. Ini bisa terjadi karena perbedaan dalam ekspektasi individu atau variasi dalam kualitas pelayanan dari satu petugas ke petugas lainnya. Triangulasi ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi di antara penerima layanan tentang sikap dan kualitas pelayanan petugas. Meskipun ada yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, ada juga yang merasakan pelayanan tersebut biasa saja. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut untuk memastikan konsistensi dalam kualitas pelayanan yang diberikan oleh semua petugas.



Gambar 4.3 Peserta Keluarga Berencana di Puskesmas tigalingga

4.6.4 Analisis Komponen Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Tabel 4.16 Matriks hasil wawancara dengan informan mengenai SOP

Informan	Pernyataan
IK-1	<i>“SOP disini mencakup langkah-langkah untuk sosialisasi, konseling, penyediaan alat kontrasepsi, dan pelaporan”</i>
IA-1	<i>“iya, membantu Langkah dalam proses pelayanan dilakukan dengan konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan”</i>
IA-2	<i>“iya jelas, untuk memastikan setiap sesi penyuluhan dilakukan dengan prosedur yang sesuai”</i>

Di fasilitas ini, Standar Operasional Prosedur (SOP) mencakup berbagai aspek penting dalam pelayanan Keluarga Berencana (KB). SOP ini meliputi langkah-langkah untuk sosialisasi, konseling, penyediaan alat kontrasepsi, serta pelaporan. Dengan adanya SOP yang komprehensif, setiap aspek pelayanan dapat dilakukan dengan konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses pelayanan di fasilitas ini dilaksanakan dengan mematuhi langkah-langkah yang telah ditentukan dalam SOP. Hal ini memastikan bahwa setiap sesi penyuluhan,

konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi dilakukan dengan prosedur yang benar dan terstandarisasi. SOP juga membantu dalam menjaga kualitas pelayanan, sehingga setiap individu yang mendapatkan layanan merasa bahwa mereka menerima informasi dan dukungan yang tepat. Dengan SOP yang jelas dan terstruktur, staf dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih terorganisir dan efisien. Ini tidak hanya mempermudah pelaksanaan tugas tetapi juga memastikan bahwa setiap sesi penyuluhan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga hasil yang diperoleh dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan optimal.

Tabel 4.17 Matriks hasil wawancara dengan informan mengenai tanggung jawab dan tantangan Fragmentasi

Informan	Pernyataan
IK-1	<i>“puskesmas bertanggung jawab memberikan penyuluhan, konseling dan layanan kontrasepsi kepada Masyarakat dan memantau efektivitas program”</i>
IA-1	<i>“Struktur birokrasi berpengaruh kepada pelaksanaa KB, tantangan muncul jika tidak ada koordinasi yang baik antara unit yang terlibat dalam pelayanan KB”</i>
IA-2	<i>“tantangan ya jika tidak bekerja sama pelayanannya akan kacau dan amburadul”</i>

Puskesmas memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan penyuluhan, konseling, dan layanan kontrasepsi kepada masyarakat. Selain itu, puskesmas juga bertugas memantau efektivitas program Keluarga Berencana (KB) untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan mencapai tujuan yang diharapkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Namun, pelaksanaan program KB tidak lepas dari tantangan yang terkait dengan struktur birokrasi.

Struktur birokrasi yang ada dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program KB. Tantangan utama muncul ketika tidak ada koordinasi yang baik antara unit-unit yang terlibat dalam pelayanan KB. Kurangnya koordinasi dapat mengakibatkan masalah dalam pelaksanaan program, seperti ketidakefisienan dalam penyuluhan, konseling, atau penyediaan layanan kontrasepsi. Jika unit-unit yang terlibat tidak bekerja sama dengan baik, pelayanan dapat menjadi kacau dan tidak teratur, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat. Kesuksesan program KB sangat bergantung pada kerja sama yang harmonis antara semua pihak yang terlibat, sehingga koordinasi yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa layanan diberikan secara efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“SOP mencakup sosialisasi, konseling, penyediaan alat kontrasepsi, dan pelaporan. Puskesmas bertanggung jawab untuk penyuluhan, konseling, layanan kontrasepsi, serta memantau efektivitas program” (IK-1)

“SOP memastikan proses pelayanan KB dilakukan secara konsisten sesuai standar. Struktur birokrasi mempengaruhi pelaksanaan KB, dengan tantangan muncul jika koordinasi antar unit tidak baik” (IA-1)

Kedua pernyataan ini memberikan perspektif yang saling melengkapi mengenai peran dan pentingnya Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di puskesmas. Pernyataan pertama (IK-1) menekankan cakupan SOP, yang mencakup sosialisasi, konseling, penyediaan alat kontrasepsi, dan pelaporan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa SOP dirancang untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari program KB dikelola dengan baik oleh puskesmas, termasuk pemantauan efektivitas program. Pernyataan kedua (IA-1) menyoroti bagaimana SOP memastikan bahwa pelayanan KB dilakukan secara konsisten sesuai standar. Selain itu, pernyataan ini menambahkan bahwa struktur birokrasi juga memainkan peran penting dalam

pelaksanaan program. Tantangan dapat muncul jika koordinasi antar unit tidak berjalan dengan baik, yang dapat mempengaruhi konsistensi dan efektivitas pelaksanaan SOP. Triangulasi ini menunjukkan bahwa SOP sangat penting dalam menjaga konsistensi dan kualitas pelayanan KB di puskesmas. Namun, keberhasilan implementasi SOP juga bergantung pada struktur birokrasi dan koordinasi antar unit. Jika koordinasi tidak berjalan dengan baik, pelaksanaan SOP dapat terganggu, yang berpotensi mengurangi efektivitas program KB.



Gambar 4.4 Pemasangan Alat Kontrasepsi

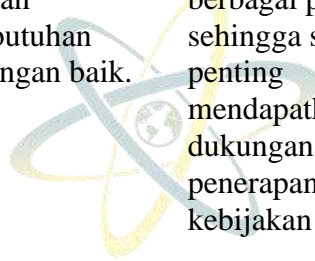
Tabel. 4.18 Matriks Analisis Hasil

Aspek Penelitian	Implementasi	Kesesuaian Teori	Hambatan
Komunikasi terkait penerapan kebijakan Program Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana (KB) ini bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui beberapa langkah strategis. Petugas mengikuti pelatihan bagi petugas puskesmas untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang	Menurut teori Edward III komunikasi merupakan bagian penting pada implementasi sebuah kebijakan publik yang efektif, komunikasi menentukan keberhasilan pencapaian	pihak puskesmas terdapat hambatan berkaitan dengan sosialisasi kepada Masyarakat karena hanya bersifat pasif menunggu Masyarakat. Sehingga terhadap sosialisasi hanya dapat dilakukan kepada setiap pasien agar dapat

	<p>diperlukan. Setelah pelatihan, petugas melakukan penyuluhan langsung kepada pasangan usia subur (PUS) dan wanita usia 15-49 tahun mengenai manfaat dan cara penggunaan alat kontrasepsi. Untuk menjangkau lebih banyak orang, informasi juga disebarluaskan melalui sosialisasi antar desa dan media sosial. Penyampaian informasi dilakukan dengan bahasa sehari-hari yang sederhana dan menciptakan lingkungan penyuluhan yang mendukung agar peserta merasa nyaman dan terbuka. Petugas rutin mengikuti pelatihan dan berdiskusi dengan rekan untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Pendekatan ini membantu mencapai tujuan program KB dengan menjangkau berbagai kalangan masyarakat dan mendukung mereka dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi.</p>	<p>kebijakan tujuan dari implementasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan dilakukan. Komunikasi oleh pembuat kebijakan ditujukan untuk mendapatkan dukungan terhadap kelompok sasaran yang akan menjalankan suatu kebijakan yang mencakup berbagai penjelasan mengenai tujuan kebijakan, manfaat, dan keuntungan yang akan dirasakan oleh kelompok sasaran. Peneliti juga menggali pemahaman beberapa informan tentang Program Keluarga Berencana. Hasil penelitian yaitu bahwa informan memahami tentang kebijakan Program Keluarga Berencana dan mendukung adanya kebijakan ini.</p>	<p>menyampaikan secara door to door menyampaikan pentingnya program keluarga berencana untuk menjaga kestabilan keuangan dan kesehatan pasangan suami dan istri.</p>
<p>Sumber daya yang</p>	<p>Di Puskesmas Tigalingga, jumlah staf yang memadai</p>	<p>Sumber daya memegang</p>	<p>Hambatan yang dimiliki adalah</p>

tersedia terkait penerapan Kebijakan Program Keluarga Berencana di Puskesmas Tigalingga kabupaten Dairi	memastikan pelayanan kesehatan yang optimal dan efisien. Petugas secara rutin mengikuti pelatihan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan terkait program Keluarga Berencana (KB), menjamin informasi yang akurat dan terkini. Pelayanan di puskesmas dikenal ramah dan empatik, menciptakan suasana nyaman bagi masyarakat. Fasilitas KB lengkap dan standar, menyediakan berbagai alat kontrasepsi dan materi edukasi, mendukung program KB secara efektif dan memastikan akses mudah bagi masyarakat. Keberadaan fasilitas dan staf yang memadai meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung keberhasilan program KB.	peranan penting setelah dilakukannya komunikasi. Petugas sebagai pengawas dan media sebagai alat informasi sangat berkaitan dengan pemberlakuan suatu kebijakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa petugas sebagai pengawas yang dimiliki dianggap masih kurang cukup untuk mengawasi kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik di area puskesmas namun keuntungan yang didapatkan melalui media informasi yang cukup dapat dipahami oleh masyarakat yang melihat informasi tersebut pada poster yang tersedia.	tidak ada, dikarenakan ruangan atau fasilitas terhadap bidang KB sudah memadai, tetapi pelayanan yang saya lihat kurang kondusif dikarenakan banyaknya peserta KB tidak focus mendengar apa yang disampaikan oleh petugas.
Disposisi (sikap) yang berkaitan dengan penerapan kebijakan Program Keluarga Berencana di Puskesmas	Pihak yang terlibat dalam pelayanan Keluarga Berencana (KB) menunjukkan komitmen tinggi dengan memberikan informasi yang jelas dan konseling mendalam, memastikan pemahaman menyeluruh tentang program KB. Petugas bertindak profesional dan	Sikap pelaksana juga memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan harus dimulai dari pembuat kebijakan dan	masih banyak Masyarakat yang belum paham makna dan tujuan keluarga berencana. Bahwa antusiasnya Masyarakat pada saat penelitian sangat tinggi terhadap program

Tigalingga kabupaten Dairi	<p>penuh tanggung jawab, menciptakan pengalaman pelayanan yang memuaskan. Meskipun ada beberapa kritik terhadap sikap yang terkesan biasa saja, secara keseluruhan, pelayanan dianggap memuaskan. Komitmen dan profesionalisme petugas mendukung keberhasilan program KB dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik.</p>	<p>harus didukung oleh pelaksana atau pihak-pihak terkait seperti pegawai puskesmas. Kebijakan Program Keluarga Berencana ini merupakan suatu kebijakan yang menguntungkan berbagai pihak, sehingga sangat penting mendapatkan dukungan terkait penerapan kebijakan ini.</p>	<p>keluarga berencana, sehingga sebelumnya masih banyak ditemukan angka kelahiran yang dekat karena kurang memahami program keluarga berencana itu sendiri. pihak puskesmas telah melaksanakan program keluarga berencana telah sesuai serta mendapat antusias dari Masyarakat. Walaupun masih kekurangan dalam hal sosialisasi langsung ke tempat tinggal Masyarakat. Namun dari pihak Masyarakat masih belum memahami apa makna dan tujuan program keluarga berencana sebenarnya, sehingga angka kelahiran masih dihitung relative tinggi. Serta masih ada ketidapkahaman Masyarakat.</p>
Struktur Birokrasi terkait penerapan kebijakan Program Keluarga Berencana di	<p>Di fasilitas ini, Standar Operasional Prosedur (SOP) mencakup sosialisasi, konseling, penyediaan alat kontrasepsi, dan pelaporan, memastikan bahwa pelayanan dilakukan secara konsisten</p>	<p>Birokrasi merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan dimana dengan adanya struktur birokrasi yang baik diberikan</p>	<p>Tidak adanya SK dan peraturan yang wajib dilaksanakan oleh puskesmas dari pemerintah daerah terkait kebijakan Program Keluarga Berencana.</p>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Puskesmas Tigalingga Kabupaten Dairi	<p>dan sesuai standar. SOP membantu staf dalam melaksanakan tugas dengan terorganisir dan efisien, menjaga kualitas pelayanan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Puskesmas bertanggung jawab memberikan layanan KB dan memantau efektivitas program. Namun, tantangan muncul dari struktur birokrasi dan kurangnya koordinasi antara unit-unit yang terlibat, yang dapat memengaruhi efisiensi dan kualitas pelayanan. Kesuksesan program KB bergantung pada kerja sama yang baik antara semua pihak terkait.</p>	<p>bagi masyarakat membuat masyarakat tidak menganggap sepele sebuah kebijakan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa struktur birokrasi yang terkait dengan Program Keluarga Berencana.</p>
--------------------------------------	--	---

4.7 Pembahasan

4.7.1 Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana

Hasil dari penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Puskesmas Tigalingga bahwa dengan cara sosialisasi dan pelatihan, pelaksana di puskesmas diberikan sosialisasi dan pelatihan terkait kebijakan program KB untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan layanan KB kepada masyarakat, setelah pelaksana di puskesmas terlatih, mereka melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Kegiatan penyuluhan memang dilakukan tetapi yang dilakukan kepada masyarakat belum maksimal. Selanjutnya tenaga kesehatan di Puskesmas Tigalingga cukup dan merata, sehingga memadai untuk melaksanakan program ini secara efektif. Ketersediaan staf yang memadai memastikan bahwa semua tugas dan

penyuluhan dapat dilakukan dengan baik. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak puskesmas bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka, termasuk menyediakan informasi yang jelas dan konseling yang mendalam dan juga memberikan pelayanan yang optimal.

Menurut George Edward III, diperoleh empat variable untuk keberhasilan kebijakan diantaranya komunikasi, sumber daya, karakter dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

a. Berdasarkan hasil pertemuan yang dilakukan dengan Kepala Puskesmas Tigalingga, Sistem Dairi, secara umum dapat diketahui bahwa ketika program pembinaan keluarga dilaksanakan, informasi tentang program tersebut disalurkan atau dikomunikasikan melalui metode koordinasi dan perluasan. Pesan dari petugas kesehatan kepada masyarakat jelas sangat kuat dan sangat ramah, meskipun strategi komunikasinya sudah terarah. Selain itu, penanggung jawab program KB bertanggung jawab untuk menginformasikan program tersebut kepada kepala puskesmas. Karena dengan berjalannya program pembinaan keluarga di Puskesmas Tigalingga, Sistem Dairi sangat bergantung pada semua unsur masyarakat, kegiatan korespondensi diharapkan dapat mengintegrasikan program tersebut agar dapat mencapai tujuan dan meningkatkan keberhasilannya. Penyelenggaraan program pembinaan keluarga dikendalikan oleh seorang kepala puskesmas yang lebih tinggi. Pimpinan puskesmas sering kali memberikan penyuluhan kepada penanggung jawab program KB tentang pembinaan yang telah dilakukan.

Di Tigalingga, Kabupaten Dairi, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sosialisasi program KB sudah dilakukan, namun belum

maksimal karena masyarakat baru mengetahui program tersebut saat datang ke puskesmas. Kurangnya pemahaman masyarakat setempat terhadap program KB, manfaat dan kerugian KB MKJP dan KB non MKJP menjadi salah satu ujian. Sosialisasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat serta koordinasi yang efektif antara masyarakat dengan petugas pelaksana program sangat diperlukan agar masyarakat dapat memahami pemerintah.

a) Edward II berpendapat bahwa komunikasi yang jelas sangat penting karena diharapkan tidak akan terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan dan masyarakat akibat adanya informasi dan komunikasi yang jelas.

b) Edward III berpendapat bahwa konsistensi sangat penting dalam mengkomunikasikan suatu perintah; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah konsisten atau berkesinambungan agar kebijakan yang dilaksanakan tidak membingungkan bagi pelaksana kebijakan dan masyarakat. Penanggung jawab program KB Puskesmas Tigalingga menggunakan bahasa sehari-hari dalam menyampaikan informasi agar mudah dipahami oleh masyarakat khususnya masyarakat Tigalingga Kabupaten Dairi. Hasil wawancara dan observasi peneliti menunjukkan bahwa penanggung jawab program KB sudah rutin melakukan pelatihan dalam kegiatan di Puskesmas, dan informasi tentang program KB di masyarakat Tigalingga sudah disampaikan secara konsisten.. Serta sejauh ini, masyarakat Tigalingga selalu memastikan terkait informasi program KB yang didapat dan diterima sama dan benar, dan masyarakat sangat antusias dan berpartisipasi

dalam keikutsertaan tentang program KB yang dilakukan oleh puskesmas Tigalingga.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisa dkk. pada tahun 2021. Pada saat ada kegiatan posyandu, kegiatan PKK, kumpul ibu-ibu, dan kegiatan lainnya, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kelurahan Kampung Malang menurut penelitiannya memberikan penyuluhan atau konseling untuk menyebarluaskan informasi tentang program KB. Pada saat tenaga kesehatan memberikan penyuluhan atau anjuran tentang pentingnya penggunaan alat kontrasepsi, mereka juga memberikan informasi tentang perencanaan keluarga kepada masyarakat sekitar yang memiliki bayi, balita, dan ibu hamil sehingga ibu hamil yang telah memiliki anak dianjurkan untuk memanfaatkan perencanaan keluarga. Tenaga kesehatan sendiri menggunakan beberapa strategi dalam metode khusus agar masyarakat Kelurahan Kampung Malang dapat menerima informasi dengan jelas. Selain itu, hasil penelitian Wahyu dkk. (Wahyu dkk., 2020) di lapangan menunjukkan bahwa penyuluhan, penyuluhan desa, dan Bakohumas merupakan beberapa metode yang digunakan untuk menyampaikan informasi program kepada kelompok sasaran. Strategi tersebut antara lain dengan melibatkan alat peraga seperti flipchart atau Unit KIE.

Mengenai pelaksanaan KB di Tigalingga pada dasarnya telah meningkat dan telah banyak menyadari pentingnya pelaksanaan KB terutama dalam kelangsungan hidup masyarakat. Bahwa program KB pada dasarnya dilakukan sebagai upaya penundaan usia kelahiran pada ibu, hal ini agar tidak mempengaruhi psikis si ibu maupun dalam perekonomian keluarga. Maka dalam hal ini Puskesmas Tigalingga telah berupaya untuk mementuk satuan kerja yang lebih memfokuskan dalam

penginformasian maupun eksplor mengenai dampak positif dari KB terutama masyarakat menengah kebawah dan kesehatan si Ibu.

Selain dari pada pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan pelaksanaan KB juga menjadi acuan untuk menjalani keluarga yang lebih rukun dan damai. Hal ini juga tidak lepas dari ajaran hukum agama yang mengutamakan kesehatan terlebih dahulu dari pada tujuan berkeluarga yang nantinya dapat menyebabkan masalah akibat angka kelahiran yang meningkat. Dalam konteks islam, komunikasi dapat di ekspresikan dengan cara yang berbeda salah satunya dengan cara berdebat dengan jalan yang baik, terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 125

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) di jalan Tuhanmu dengan makanan enak dan perbincangan, serta cara memasaknya yang terbaik. Hasilnya, Tuhanmu Dialah adalah siapa yang tersesat dari jalanan, dan Dia (pula) adalah siapa yang mendapat petunjuk. (QS. An-Nahl :125).

Setelah memohon kepada Nabi Muhammad agar meneladani Nabi Ibrahim sebagai seorang imam, nabi, dan rasul, Allah memintanya untuk "menyeru dan mengajak manusia ke jalan yang sesuai dengan tuntunan Tuhanmu, yaitu Islam, dengan hikmah, yaitu teguh, benar, dan bijaksana, serta dengan ajaran yang baik" pada ayat 125. "Hai Nabi Muhammad, serukan dan sambutlah manusia ke jalan yang sesuai dengan tuntunan Penguasamu, yaitu Islam," adalah makna dari bait ini. Dengan mereka yang mempertanyakan, menentang, atau tidak setuju dengan seruanmu, terlibatlah pula dalam perdebatan yang produktif. Tuhanmu tidak

diragukan lagi adalah orang yang memberi petunjuk kepadamu. Dia juga lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk dan di jalan yang benar, serta siapa yang menyimpang dan menyimpang dari Jalan-Nya.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya pendekatan yang bijaksana, metode yang tepat, dan interaksi yang baik dalam menyampaikan pesan. Pendekatan ini memastikan bahwa pesan dapat diterima dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, baik dalam konteks dakwah maupun dalam berbagai situasi komunikasi lainnya.

2. Sumber Daya

Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor sumber daya. Menurut Edward III, sumber daya tersebut meliputi sumber daya fasilitas dan sumber daya manusia (Iqbal, 2022).

- a. Karena suatu program akan berjalan lambat apabila tidak tersedia tenaga yang kompeten, maka sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pimpinan Masyarakat Sejahtera dan Penanggung Jawab Program KB merupakan aset (staf) yang dimaksud dalam strategi Pelaksanaan Proyek Perencanaan Keluarga. Individu tersebut memegang peranan penting dalam setiap tindakan program perencanaan keluarga di tingkat daerah dan subdaerah, sehingga penanggung jawab program KB harus siap dalam melakukan praktik lapangan. Dalam SDM yang terlibat dalam pelaksanaan sistem program KB di Puskesmas Tigalingga, saat ini telah terdapat SDM yang memadai. Hal ini terlihat dari pelaksanaan penyiapan secara rutin bagi penanggung jawab program perencanaan

keluarga yang dirugikan oleh Puskesmas Tigalingga yang telah mendapatkan pembinaan tentang manfaat sistem perencanaan keluarga dan alat kontrasepsi.

- b. Sarana merupakan variabel pendukung yang menjamin terlaksananya suatu strategi secara terarah. Tanpa adanya dukungan kantor dan perencanaan keuangan yang memadai, program tidak akan berjalan dengan baik dan akan berdampak pada hakikat administrasi yang diberikan kepada daerah (Iqbal, 2022). Dalam setiap pelaksanaan kebijakan, sumber daya sarana meliputi dana yang cukup dan tersedianya sarana atau prasarana. Berdasarkan hasil rapat para ilmuwan, tampaknya aset kantor program KB Tigalingga Wellbeing Center kurang memadai. Hal ini terlihat dari ketersediaan aset selama pelaksanaan program dan tidak tersedianya kantor untuk alat kontrasepsi KB.

Terhadap sumber daya diatas dirasa masih kurang di Puskemas Tigalingga sehingga memberikan hambatan dalam pelaksanaan KB bagi masyarakat. Tingginya angka minta KB di masyarakat ini tentunya mendorong pemerintah untuk menyediakan sarana dan fasilitas yang harus mempuni serta tenaga medis yang mempuni. Bahwa dengan hambatan tersbeut akan mempengaruhi pelaksanaan KB bagi masyarakat. Adapun hambatan ini biasanya ditemukan di Puskemas Tigalingga yaitu mnegenai ketersediaan alat kontrasepsi nya, alat untuk metode operasi pria (MOP) tidak ada di puskesmas, dikarenakan menurut pria hal MOP ini membuat tidak ada kenjantanan, merasa merusak citra maskulinitas atau khas pria, ketika ada yg mau mop langsung dirujuk ke RSUD sidikalang.

Maka untuk itu harusnya pemerintah Kabupaten Dairi harus lebih

memberikan perhatian khusus terkait kebijakan pelaksanaan KB di setiap Puskemas terutama Puskemas Tigalingga. Bahwa dalam konteks Sumber Daya ini yang dapat memberikan dorongan serta kemampuan dalam menangani atau melayani masyarakat yang ingin melakukan KB di sekitaran Puskesmas Tigalingga.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Dodie pada tahun 2020. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa petugas lapangan KB telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sumber daya manusia (SDM) memiliki staf yang cukup untuk melaksanakan program KB. Namun, masih sulit untuk menganggarkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh puskesmas dan bidan. Hasil penelitian yang dilakukan Indiri Sri pada tahun 2022 menunjukkan bahwa puskesmas memiliki SDM yang cukup.

Dalam konteks islam, sumber daya dapat di ekspresikan kedalam surah An-Anfal ayat 60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Dengan kekuatan dan pasukan berkuda yang Anda miliki, bersiaplah untuk menghadapi mereka. Dengan kesiapan itu, Anda akan mengejutkan musuh-musuh Allah, lawan-lawan Anda, dan siapa pun yang tidak Anda kenal, tetapi Allah mengetahuinya. Anda tidak akan tertipu, dan jika Anda membelanjakan uang Anda untuk tujuan Allah, hampir pasti uang itu akan dikembalikan kepada Anda secara penuh. (QS. An-Anfal : 60).

Adapun tafsir dari surah An-Anfal ayat 60 yaitu Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengambil tindakan keras—bahkan sampai mengusir orang-orang Yahudi Bani Quraidhah yang telah melanggar perjanjian—dan

mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin untuk menghadapi kemungkinan hasil negatif atau pembalasan. Oleh karena itu, bersiaplah untuk menghadapi mereka yang telah terbukti menentang Islam dengan memanfaatkan seluruh kekuatan Anda dan pasukan berkuda yang sebenarnya siap berperang. Memiliki kemampuan untuk menakut-nakuti musuh Allah, musuh Anda, serta orang-orang yang tidak Anda kenal karena salah tafsir atau musuh Islam yang permusuhannya belum jelas adalah pembenaran untuk mengumpulkan kekuatan yang paling signifikan; Allah selalu tahu kapan dan di mana. Bagian berikut mengusulkan sebuah pemikiran bagi orang-orang yang ingin berperang di jalan Allah, yaitu memberikan komitmen: "Apa pun yang Anda berikan dalam strategi untuk Allah niscaya akan dibalas dengan cukup atau bahkan digandakan selama itu sesuai dengan Anda dan Anda tidak akan diabaikan, atau mungkin, disakiti atau dikurangi sedikit pun oleh pahala kebaikan." Sebab, berperang di jalan Allah membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Dapat disimpulkan Surah Al-Anfal ayat 60 dan teori sumber daya sama-sama menekankan pentingnya persiapan dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks Islam, ayat ini mendorong umat untuk mempersiapkan diri dengan baik menghadapi tantangan, sementara dalam teori Edward, sumber daya yang memadai dan dikelola dengan baik adalah kunci untuk efektivitas kebijakan. Keduanya menggarisbawahi bahwa tanpa sumber daya yang cukup dan tepat, tujuan tidak akan tercapai dengan baik.

3. Disposisi

Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengambil tindakan tegas—bahkan sampai mengusir orang-orang Yahudi Bani Quraidhah yang telah melanggar perjanjian—dan mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin untuk

menghadapi kemungkinan hasil negatif atau pembalasan. Oleh karena itu, bersiaplah untuk menghadapi mereka yang telah terbukti menentang Islam dengan sekuat tenaga dan pasukan berkuda yang sebenarnya siap berperang. Legitimasi untuk mengumpulkan kekuatan utama adalah kapasitas untuk menakut-nakuti musuh-musuh Allah, musuh-musuh Anda, orang-orang yang tidak Anda kenal karena distorsi, atau musuh-musuh Islam yang permusuhanannya masih belum jelas; Allah pada umumnya tahu kapan dan di mana. "Apa pun yang Anda berikan dalam metode untuk Allah pasti akan dikompensasi dengan cukup atau bahkan ditiru untuk apa pun yang sesuai dengan jangka waktu itu dan Anda tidak akan diberhentikan, mungkin, disakiti atau dikurangi sedikit pun oleh kemuliaan kebaikan," bagian berikut menyarankan sebagai strategi bagi individu yang ingin berjuang dalam prosesnya untuk Allah. Sebab, untuk berperang di jalan Allah dibutuhkan biaya yang sangat besar.

Dalam konteks islam, sumber daya dapat di ekspresikan kedalam surah Annisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, berserahlah kepada Allah, Muhammad, Rasulullah, dan para ululamri (pemegang kekuasaan) di tengah-tengah kalian. Kembalikanlah perselisihan kepada Allah (dalam Al-Qur'an) dan Rasulullah (dalam Sunnah) jika kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih baik bagi masa kini dan masa yang akan datang (QS. Annisa) : 59).

Menurut tafsir ayat 59 Surat Annisa ini, maka sangat penting untuk menaati

perintah yang dengannya hukum yang masih berlaku itu dilaksanakan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Berdasarkan ayat ini, umat Islam diperintahkan untuk menaati pilihan-pilihan yang sah yang telah ditetapkan dengan berbagai tingkatan, dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Selama perintah-perintah ini tidak bertentangan dengan firman Allah dan Rasul-Nya, maka ikutilah perintah-perintah yang telah diberikan kepadamu di dalam Al-Qur'an, dan juga perintah-perintah yang diberikan kepadamu oleh Nabi Muhammad dan Ulil Amri, yang memimpinmu. Kemudian, jika kamu memiliki pendapat-pendapat yang berbeda tentang suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan, maka kembalilah kepada sifat-sifat dan jiwa yang dapat diandalkan, yaitu Al-Qur'an, dan juga sifat-sifat dan jiwa dari ajaran Nabi sebagai sunnahnya, sebagai penegasan bahwa kamu benar. - benar-benar bertawakal kepada Allah dan Hari Akhir. Itu lebih penting bagimu dan lebih baik pengaruhnya dalam jangka panjang.

Dapat disimpulkan bahwa Surah An-Nisa ayat 59 dan konsep disposisi dalam teori George Edward sama-sama menekankan pentingnya sikap dan disposisi yang benar dalam pelaksanaan tugas dan kebijakan. Ketaatan, kepatuhan, dan sikap yang ikhlas sangat diperlukan baik dalam konteks keagamaan maupun dalam pelaksanaan kebijakan publik. Disposisi yang positif akan meningkatkan efektivitas dan keberhasilan implementasi kebijakan, sesuai dengan prinsip yang diajarkan dalam ayat tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi pelaksana kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dua aspek dari struktur organisasi tersebut adalah

fragmentasi dan standar operasional prosedur (SOP) (Nurinzana, 2022). Berdasarkan hasil wawancara di atas, Kepala Puskesmas Tigalingga dan Penanggung Jawab Program KB memaparkan standar operasional prosedur (SOP). Dalam menjalankan tugasnya di lapangan, masing-masing individu tersebut mengacu pada standar operasional prosedur (SOP). Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, pelaksanaan pelayanan program KB di Puskesmas Tigalingga yang mengacu pada rencana program kerja yang telah ditetapkan maupun Standar Operasional Prosedur dapat disimpulkan sudah cukup baik jika dilihat dari segi SOP. Hal ini menunjukkan bahwa apabila standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan kebijakan program KB sudah lengkap, maka diharapkan pelaksanaan di lapangan akan lebih konsisten. Aspek kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di atas, fragmentasi kebijakan pelaksanaan program KB di Puskesmas Tigalingga sudah sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dapat diyakini bahwa pelaksanaan di lapangan akan berjalan lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian (Atik Rochaeni dkk., 2022) yang menemukan bahwa SOP KB di Kecamatan Arjasari sudah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program KB mulai dari kegiatan awal sampai dengan tahap akhir. SOP KB di Kecamatan Arjasari sudah cukup lengkap, rinci, dan jelas sesuai dengan hasil evaluasi program. Selain itu, berdasarkan penelitian (Anisa dkk., 2021) setiap pelaksana sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam melaksanakan atau menjalankan kebijakan kerjanya di lapangan agar tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

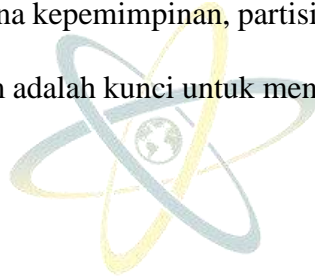
Dalam konteks islam, disposisi dapat di ekspresikan kedalam surah Al-Imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Oleh karena itu, Nabi Muhammad memperlakukan mereka dengan baik atas karunia Allah. Jika Anda memiliki hati yang keras dan berperilaku buruk, mereka secara alami akan menjauhi Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Jadi, bicarakanlah dengan mereka tentang segala hal (yang penting) dan mintalah maaf dari mereka. Setelah Anda memutuskan, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah menganggap orang-orang yang bertawakal kepada-Nya sebagai orang yang berharga. (QS. Al Imran : 159).

Ayat 159 Surat Al-Imran ditafsirkan sebagai ucapan bahwa Allah memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad untuk memberikan petunjuk khusus kepada orang-orang beriman. Selama Perang Uhud, Anda bersikap baik kepada mereka yang melanggar aturan karena rahmat Allah yang besar. Jika Anda kejam, memiliki sikap yang buruk, kasar, berpikiran sempit, atau keras terhadap keadaan orang lain, mereka akan berpaling dari Anda. Jadi, mohonlah kepada Allah untuk mengampuni mereka, menebus kesalahan mereka, dan berbicaralah kepada mereka tentang isu-isu khusus yang terkait dengan perang serta yang lebih umum seperti masalah politik, keuangan, dan sosial. Setelah itu, jika Anda telah memutuskan untuk melaksanakan konsekuensi dari konsultasi, Anda harus bertawakal kepada Allah dan mengakui kekurangan Anda di hadapan Allah setelah mengerahkan segala upaya. Sesungguhnya, Allah menghargai orang-orang yang bergantung kepada-Nya.

Adapun kesimpulan dari Surah Al-Imran ayat 159 dan konsep struktur birokrasi dalam teori George Edward sama-sama menekankan pentingnya kepemimpinan yang baik, proses musyawarah, pengambilan keputusan yang tegas, dan kepercayaan pada sistem. Ayat tersebut mengajarkan bahwa pemimpin harus bijaksana, melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, dan bertindak dengan tanggung jawab. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip struktur birokrasi yang efektif, di mana kepemimpinan, partisipasi, pengambilan keputusan, dan kepercayaan pada sistem adalah kunci untuk mencapai tujuan yang diinginkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN